

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kesimpulan berikut ini didasarkan atas hasil penelitian, pembahasan, serta kajian kepustakaan yang relevan dan temuan selama penelitian berlangsung.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa penelusuran penyebab rendahnya tingkat melanjutkan dari SD ke SLTP dapat dijadikan bahan kajian yang bermakna bagi pematangan rencana pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. Dengan terungkapnya penyebab itu, para perencana dan pengambil kebijakan akan dapat menentukan langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan angka melanjutkan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyalurkan aspirasinya dalam bidang pendidikan.

Rencana merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan dasar 9 tahun direncanakan akan ditetapkan sebagai suatu "kewajiban" bagi setiap warga negara Indonesia pada awal pelita VI mendatang. Untuk itu, perlu perencanaan yang seksama, dengan melihat keterbatasan yang ada, dan diarahkan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Secara khusus, beberapa pokok kesimpulan penelitian ini terutama dirumuskan berkenaan dengan fokus permasalahan tesis ini.

Berdasarkan penelusuran awal terhadap lulusan SD/MI di Kabupaten Bogor, sedikitnya ditemukan tiga kecenderungan perbedaan karakteristik wilayah di Kabupaten Bogor. Ada dua "kutub kontinum" antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Pertama, semakin dekat dengan pusat kota suatu wilayah menampakkan ciri-ciri masyarakat industri-modern yang lebih nyata, penduduknya padat, sarana transportasi dan sarana pendidikan lebih memadai, kebutuhan akan tenaga kerja terdidik semakin nyata. Akibatnya kebutuhan akan pendidikan meningkat, aspirasi melanjutkan dan angka melanjutkan semakin tinggi. Tetapi hal tersebut hanya dialami kelompok keluarga pegawai tetap baik negeri maupun swasta dan pedagang menengah ke atas. Sedangkan mereka yang berasal dari golongan ekonomi lemah (seperti pedagang "pikul" atau "bakul", dan buruh tidak tetap), anak-anak mereka tertarik ke dunia industri, terutama industri kecil atau *home industri* (seperti ke pabrik Baygon, Rotan, Boneka, Manisan/makanan, dan pabrik bahan bangunan). Sebagian kecil dari kelompok ini ada yang sanggup bertahan sekolah sambil bekerja.

Ke-dua, Wilayah yang jauh dari pusat-pusat kota cenderung "bergaya agraris", penduduknya jarang, sarana

transportasi dan sarana pendidikan terasa kurang, walaupun daya tampung cukup tetapi daya jangkauan kurang mendukung. Di wilayah ini kebutuhan akan pendidikan tak terasa mendesak, dalam pergaulan sehari-hari anak-anak yang tidak sekolah lebih dominan, tingkat *dropout* tinggi, sedangkan aspirasi melanjutkan dan angka melanjutkan rendah. Petani pemilik tanah di wilayah ini jumlahnya sangat sedikit, karena tanah banyak dimiliki orang kota. Sebagian besar dari mereka adalah buruh tani dan buruh perkebunan ("karet") yang penghasilannya sangat minim dan tidak tetap. Dari golongan ini, anak cenderung terlibat dalam kegiatan ekonomi keluarga (membantu orang tua), tak ada waktu dan biaya untuk meneruskan ke sekolah lanjutan.

Ke-tiga. Daerah yang kehidupan beragamanya (Islam) lebih menonjol, memiliki lembaga pendidikan keagamaan yang lebih memadai dibandingkan dengan daerah lainnya. Aspirasi melanjutkan dan angka melanjutkan lebih dominan ke lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti MTs, SMP Islam dan Pondok pesantren. MTs dan Pesantren di kabupaten Bogor dan di luar kabupaten Bogor mampu menyerap lulusan SD/ MI tahun 91/92 sebanyak 15.604 orang (22,12 %).

Ke-empat. dari kasus-kasus yang ditelusuri di Kecamatan Cileungsi dapat disimpulkan bahwa "ternyata

penyediaan daya tampung saja belum mampu menarik semua lulusan SD/MI untuk melanjutkan ke SLTP. Ada faktor lain yang perlu mendapat perhatian khusus untuk men-sukseskan rencana di atas". Di Cileungsi terdapat 2.493 orang, tersedia daya tampung kelas 1 sebanyak 1.610 kursi, namun daya tampung yang terisi hanya 1.338 kursi. Di samping masih ada kursi yang kosong, ternyata masih sekitar 1.287 orang (47,07 %) lulusan yang belum memanfaatkan kesempatan yang ada. Gejala lain yang perlu mendapat perhatian adalah "di samping ada seko-lah-sekolah yang kekurangan siswa, ada pula sekolah-sekolah yang kelebihan siswa". Setelah diamati lebih seksama ternyata sekolah yang kelebihan siswa ini terdapat pada sekolah-sekolah yang tidak menarik biaya pendidikan, sekolah yang moderat dalam penarikan sum-bangan pembiayaan pendidikan, dan sekolah yang letaknya strategis. Sedangkan pada sekolah yang kekurangan siswa umumnya mempunyai peraturan yang ketat dalam penarikan iuran, uang pangkal dan uang seragam yang harus disetor pada awal tahun tinggi, serta letak sekolah yang kurang strategis.

Ke-lima, terdapat beberapa faktor dominan yang berkaitan dengan keempat kecenderungan di atas, antara lain (1) rendahnya status sosial-ekonomi orang tua mereka; (2) biaya pendidikan relatif "mahal" dan keinginan untuk bekerja lebih dominan; (3) faktor

prestasi belajar di sekolah asal (SD/MI) dapat mengurangi semangat dan dukungan orang tua; serta (4) ketatnya seleksi masuk sekolah negeri.

Anak yang berasal dari keluarga yang sosial-ekonominya lemah seringkali kehilangan kesempatan untuk belajar dan tidak dapat mengembangkan diri sebagaimana mestinya, walaupun ketika di SD mereka telah menunjukkan prestasi yang baik, tetapi tetap "mandeg" karena keterbatasan keluarga.

Ke-enam, angka partisipasi pendidikan pada tingkat sekolah dasar setiap tahunnya terus meningkat, bahkan kini telah mencapai angka 99,96 %. Peningkatan partisipasi pendidikan ternyata tidak sejalan dengan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan SD, yang nampak semakin rendah.

Terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang sekolah partisipasi pendidikan semakin rendah, namun di balik itu ada hal yang cukup menggembirakan, yaitu semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi pula kepedulian masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh semakin besarnya proporsi sekolah swasta, pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan

proporsi sekolah negeri.

Ke-tujuh, besar kecilnya rentang wilayah dan jumlah penduduk dapat mempengaruhi peluang melanjutkan atau daya tampung. Di wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang banyak peluang melanjutkan menjadi semakin kecil.

Hal lain yang perlu diwaspadai adalah adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, semakin besar ketergantungannya untuk bekerja kepada pihak lain. Dan yang berpendidikan rendah cenderung bekerja mandiri dan terjun di sektor informal.

Ke-delapan, perubahan tata guna tanah yang meliputi wilayah yang luas besar pengaruhnya terhadap pola kerja dan ketenagakerjaan, tetapi tidak banyak berpengaruh pada aspirasi melanjutkan dan tingkat melanjutkan. Sedangkan aspirasi politik rakyat masih cenderung "manut" pada golongan mayoritas dan kepanjangan "tangan pemerintah", hal ini tidak banyak pengaruhnya pada aspirasi melanjutkan. Namun, kemauan politis pemerintah untuk memperluas dan meningkatkan demokratisasi dalam bidang pendidikan cenderung diikuti oleh melemahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas pendidikan.

B. R e k o m e n d a s i

Berdasarkan hasil-hasil penelitian ini, terdapat beberapa kebijakan yang harus ditempuh oleh instansi terkait dalam rangka mensukseskan perintisan wajib belajar pendidikan dasar ini, serta sumbangannya bagi pemantapan rencana pelaksanaan wajar SLTP di Kabupaten Bogor. Beberapa rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengingat adanya perbedaan karakteristik wilayah, kepadatan penduduk, orientasi pengembangan wilayah, dan kebutuhan akan sarana pendidikan, diperlukan adanya rencana pengembangan pendidikan terpadu untuk masing-masing wilayah Kecamatan dalam bentuk rencana pengembangan tahunan dan lima tahunan. Khusus untuk mensukseskan program wajar pendidikan dasar perlu penterapan model pendekatan pemetaan SMTP di tiap kecamatan sebagaimana dimaksud oleh Badan Perencana Pendidikan Nasional (BPPN). Dengan konsep pemetaan tersebut aspirasi masyarakat terhadap sekolah lanjutan akan lebih terakomodasikan.
2. Sekolah yang banyak belum menjamin anak-anak memasuki sekolah yang ada tersebut. Ada aspek-aspek manajemen yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat, misalnya dalam penarikan dan pemanfaatan sumbangan dari orang tua, atau dalam menggali potensi masyarakat yang dapat menunjang

kelancaran proses belajar mengajar. Di daerah-daerah pinggiran, yang sebagian besar masyarakatnya kurang mampu, diperlukan kejelian dan kiat-kiat tertentu untuk dapat menghimpun partisipasi masyarakat.

3. Aspirasi untuk melanjutkan sudah cukup tinggi, masalah selanjutnya bagaimana menguatkan aspirasi itu agar menjadi kenyataan ("melanjutkan"). Peningkatan kemampuan ekonomi merupakan aspek lain di luar bidang pendidikan. Selain menyediakan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengurangi beban bagi yang tak mampu, diperlukan adanya beberapa kebijakan yang perlu disepakati bersama, antara lain:
 - a. Persyaratan kerja di sektor formal, dalam bidang apa saja, disamping harus telah berusia 17 tahun, juga harus ditetapkan persyaratan pendidikan, minimal harus lulus SLTP atau yang sederajat. Pada saatnya nanti, hal tersebut harus diperluas lagi, misalnya yang diperkenankan memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) adalah mereka yang telah lulus SLTP atau yang sederajat. Alasannya, banyak ketentuan lalu lintas dan hukum yang mengaturnya memerlukan tingkat pemahaman tertentu. Dan jika menghadapi persoalan lalu lintas maka yang bersangkutan akan lebih mampu mengatasinya sesuai

- dengan aturan yang berlaku.
- b. Ketentuan/kebijakan yang melindungi dan mengatur pembiayaan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, anak yatim-piatu dan anak-anak "terlantar".
 - c. Menanamkan pengertian kepada masyarakat luas melalui berbagai media, oleh semua instansi terkait, dan dalam setiap kesempatan menjelaskan bahwa dengan pendidikan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan anak, maka akan mampu menghadapi tantangan-tantangan baru dan kebutuhan masa depannya. Jalur keagamaan masih efektif untuk digunakan, misalnya penerangan dan ajakan oleh ustad, khotib, dan alim ulama yang ada di daerah masing-masing.
 - d. Menjelaskan perlunya kesadaran masyarakat bahwa pendidikan dasar 9 tahun bukan hanya kepentingan pemerintah, tetapi pada hakekatnya merupakan kepentingan setiap warga negara, agar mereka memiliki kemampuan minimal yang diperlukan untuk bertahan hidup dan mampu menghadapi tuntutan perubahan yang akan mereka hadapi.
4. Hampir semua responden menyatakan bahwa sebab utama lulusan SD/MI tidak melanjutkan adalah karena kondisi ekonomi keluarga yang amat terbatas. Alasan kemiskinan tersebut perlu mendapat perhatian seksama

dari berbagai instansi terkait. Pembebasan biaya bagi semua anak di tingkat SLTP akan sangat membe-ratkan pemerintah dan kurang memupuk partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan. Untuk menanggulangi alasan kemiskinan, kiranya guru atau kepala SD/MI dapat memberikan rekomendasi bebas biaya pendidikan kepada mereka yang dinilai berhak untuk itu. Sumbangan pembiayaan pendidikan merupakan perwujudan tanggung jawab orang tua (khususnya yang mampu), sedangkan bagi yang tidak mampu mempunyai hak untuk mendapat bantuan, berupa "dapat mengikuti pendidikan yang diwajibkan tanpa harus dibebani dengan kewajiban untuk membayar". Lebih dari itu, anak-anak "terlan-tar", yatim-piatu yang tidak tentu penanggung jawab-nya, dan anak-anak dari keluarga yang miskin berhak mendapatkan tunjangan pendidikan dalam bentuk "beasiswa, barang-barang keperluan pelajaran, ataupun perlindungan keluarga (orang tua asuh). Untuk menutupi semua kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di SLTP disamping mengandalkan anggaran dari pemerintah (APBN, APBD dan sumber lainnya), dapat pula diusahakan perolehan dana dan bantuan dari berbagai sumber yang ada di masyarakat. Misal-nya dengan pengelolaan hasil zakat dari umat islam,

atau sumbangan dari perusahaan yang ada di sekitar sekolah. Hal ini dapat dilakukan di masing-masing wilayah.

5. Bagi mereka yang amat mendesak kebutuhan untuk cepat bekerja dan ingin memiliki keahlian khusus, serta untuk pegangan hidup dan sumber nafkah, sementara mereka berasal dari keluarga tidak mampu, sebaiknya mereka ini diakomodasikan melalui Pendidikan Luar Sekolah oleh Masyarakat (PLSM), karena pendidikan jenis ini lebih efisien, efektif, lebih fleksibel dalam mekanisme penyelenggaraannya, serta responsif terhadap tuntutan-tuntutan baru, yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan. Kegiatannya bisa dalam bentuk kursus-kursus, magang di bengkel kerja atau bekerja sambil belajar. PLSM amat efisien jika dilihat dari anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, karena sebagian besar sumberdaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan tersebut telah ditanggung oleh masyarakat. "Jenis PLSM dimaksud dapat berupa latihan kerja, pendidikan umum, pendidikan keagamaan (sejenis pesantren), pendidikan kedinasan, dan pendidikan kejuruan" (PP. No. 73 tahun 1991. Bab III. Pasal 3 ayat 1).
6. Pembinaan bakat dan prestasi. Bakat dan prestasi yang baik dalam diri seorang anak merupakan modal dasar yang perlu dikembangkan. Sementara itu, banyak

anak-anak yang berprestasi di SD/MI, tetapi hanya karena tidak mampu lalu mereka tidak melanjutkan, seperti kasus Ibrohim di Rawailat atau kasus Handa di Nambo. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kemandegan prestasi belajar, karena potensi berprestasi seolah-olah menjadi terbunuh karenanya.

7. Kembangkan potensi keagamaan. Hampir di setiap pelosok ke-RT-an terdapat kelompok pengajian anak-anak, jika diantara mereka tidak dapat bersekolah karena berbagai kendala yang dihadapi maka kelompok pengajian ini dapat pula dilengkapi dengan pemberian paket pendidikan dasar (Paket A dan B).
8. Dipersifikasi dan modifikasi program. Program paket A dan B mempunyai fesibilitas yang tinggi untuk diterapkan pada berbagai kondisi masyarakat. Sebagai contoh; "Industri yang banyak menggunakan tenaga kerja yang hanya tamat SD atau tidak tamat SD, sebaiknya memberikan kesempatan untuk memperoleh peningkatan tingkat pendidikan karyawannya, dengan jalan menyelenggarakan program paket A atau B". Dunia kerja yang dapat memberikat paket "magang" harus dibina dan dikembangkan, serta diarahkan untuk dapat memberikan sertifikasi keahlian, bila mungkin dilengkapi dengan pemberian paket pendidikan dasar. Sehingga bukan hanya sertifikat keahlian yang diper-

oleh, tetapi dapat juga disetarakan dengan ijazah SLTP.

9. Pemerintah, khususnya Depdikbud supaya lebih tanggap terhadap aspirasi masyarakat, memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang ingin mendirikan sekolah. Bantuan terhadap sekolah yang diselenggarakan oleh swasta layak mendapat proporsi yang lebih besar, sehingga hal ini tetap dapat memelihara dan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

